



Prosedur Penerbitan Surat Ukur Kapal Baru Luncur Barge Patria 3222 pada KSOP oleh PT Menara Shipping Agency Batam

Tedi Kurniawan¹, Dirhamsyah², Yuna Sutria³

^{1,2,3} Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi Penulis : tedikurniawan184@gmail.com

Abstract. *The purpose of writing this paper is to identify the Procedure for Issuing Measuring Letters for Newly Launched Barge Patria 3222 Ships at KSOP by PT Menara Shipping Agency Batam and to identify what are the obstacles or obstacles as well as solutions in issuing measuring letters for newly launched ships. This paper was written using field research methods, namely observation and interviews and library research methods. The results of this research state that the applicable procedures for issuing measurement letters for newly launched ships by KSOP Batam are in accordance with the regulations issued by the Minister of Transportation. The initial procedure that must be carried out by Barge Patria 3222 is to submit a request for measurements from Barge Patria 3222 to PT Menara Shipping Agency Batam. Then Barge Patria 3222 registered online on the KSOP website specifically for Batam (www.ksopkhususbatam.id). The documents that have been submitted will be checked again by the Head of Ship Seaworthiness for approval. After approval, several surveyors are sent to carry out physical measurements of the ship and then the results are compiled into a report. If the report has been received, KSOP will verify and validate the report results. For issuance, the owner will be asked to wait some time to receive the newly released measurement letter.*

Keywords: *Procedures, Issuance, Ship Measuring Letters*

Abstrak. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Prosedur Penerbitan Surat Ukur Kapal Baru Luncur Barge Patria 3222 Pada KSOP Oleh PT Menara Shipping Agency Batam serta mengidentifikasi apa saja yang menjadi kendala atau hambatan serta solusi dalam penerbitan surat ukur kapal baru luncur. Penelitian ini ditulis menggunakan metode lapangan (*field research*), yaitu observasi dan wawancara (*interview*) serta Metode Kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur penerbitan surat ukur kapal baru luncur oleh KSOP Batam yang berlaku sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Prosedur awal yang harus dilakukan Barge Patria 3222 adalah mengajukan permohonan pengukuran dari Barge Patria 3222 kepada PT Menara Shipping Agency Batam. Kemudian Barge Patria 3222 melakukan pendaftaran *online* pada *website* KSOP khusus Batam (www.ksopkhususbatam.id). Dokumen yang telah diserahkan akan dicek kembali oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal untuk *approved*. Setelah *approved*, beberapa *surveyor* dikirimkan untuk melakukan pengukuran fisik kapal dan kemudian hasil tersebut disusun menjadi laporan. Jika laporan sudah diterima, maka pihak KSOP akan memverifikasi sekaligus validasi hasil laporan. Untuk penerbitan, *owner* akan diminta menunggu beberapa waktu untuk dapat menerima surat ukur baru luncur tersebut.

Kata kunci: Prosedur, Penerbitan, Surat ukur kapal

1. LATAR BELAKANG

Mengingat pentingnya transportasi di bidang jasa pelayaran untuk mempermudah akses pengiriman penumpang dan produk maka kapal yang dipergunakan harus memenuhi beberapa syarat Laiklaut sehingga kapal tersebut dapat dinyatakan layak untuk digunakan. Salah satu syarat Laiklaut yaitu berhubungan dengan Surat Ukur Kapal yang memang menjadi persyaratan status hukum kapal dengan tujuan kapal tersebut dinyatakan Laiklaut (*seaworthy*) yang artinya kapal *safety* ketika beroperasi. Surat ukur kapal merupakan salah satu sertifikat yang wajib dimiliki setiap kapal sebelum luncur ke perairan, baik perairan internasional maupun nasional. Dalam hal ini, untuk mempermudah akses keberangkatan kapal, KSOP memiliki hubungan kerja sama dengan

beberapa *agency* jasa Pengiriman atau Keagenan. Hal ini terbukti dari salah satu perusahaan atau *agency* yang mengeluarkan beberapa sertifikat atau berkas lainnya, seperti perusahaan PT Menara Shipping Agency Batam.

2. KAJIAN TEORITIS

Prosedur

Prosedur merupakan cara untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016).

Pengukuran Kapal

Pengukuran kapal wajib dilakukan sebelum kapal melakukan giat luncur. Pengukuran kapal terdiri atas pengukuran setiap sisi bidang dan tonase kapal berdasarkan dengan metode pengukuran kapal yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal. Hasil pengukuran kapal dapat ditulis sebagai berikut :

- 1) Nama kapal
- 2) Tanda huruf pengenalan
- 3) Tempat pendaftaran
- 4) Tempat peletakan lunas
- 5) Ukuran pokok
- 6) Tonnase kotor dan Tonnase bersih
- 7) Ruang-ruang yang termasuk dalam tonnase kotor/bersih
- 8) Panjang kapal keseluruhan

Kelaiklautan Kapal

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 bab 1 ayat 33 yang membahas Kelaiklautan kapal, Kelaiklautan kapal adalah kondisi kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan dinyatakan layak untuk berlayar, baik dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesejahteraan awak kapal kesehatan penumpang, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Dokumen

Menurut Juliyanto, F., (2021) Dokumen (dokumentasi) pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Sistem

Menurut Juliyanto, F., (2021) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk tujuan tertentu.

Penerbitan Surat Ukur Kapal

Penerbitan surat ukur kapal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak syahbandar sebelum kapal berlayar meninggalkan pelabuhan di wilayah tertentu. Kapal yang akan beroperasi harus dipastikan memenuhi kelaiklautan kapal (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013).

Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut Yudhi Setiyantara et al., (2022) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Agen Perusahaan Pelayaran

Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang didirikan untuk melakukan bisnis keagenan kapal yang dituju oleh perusahaan angkutan laut asing untuk megurusi kepentingan kapalnya selama bersandar di perairan Indonesia (Undang-Undang No.17 tahun 2008 ayat 3). Agen perusahaan pelayaran dikatakan juga sebagai salah satu tim yang menjalin hubungan kerja sama guna mempermudah proses keberangkatan kapal dengan menyusun cara alternatif untuk meminimalisir hambatan sebelum kapal lancar.

3. METODE PENELITIAN

Metode lapangan (*Field Research*) :

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan dua metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi sebagai pendukung penelitian ini yaitu :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan, dengan disertai analisis dan identifikasi langsung ke PT Menara Shipping Agency Batam yang menjadi objek penulisan dalam penelitian ini. Penulis secara langsung terjun ikut serta kegiatan untuk mengidentifikasi prosedur penerbitan surat ukur kapal baru lancar.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah cara mendapatkan keterangan dengan proses tanya jawab langsung dengan sumbernya seperti karyawan PT Menara Shipping Agency Batam dan KSOP Wilayah Batam untuk mendapatkan informasi dan pernyataan yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Prosedur Penerbitan Surat Ukur Kapal Baru luncur.

Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini diperoleh dari perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari buku pendukung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk keakuratan penulisan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerbitan Surat Ukur Kapal Baru Luncur

a) Permohonan Pengukuran

Khusus Barge Patria 3222, pihak *owner* mempercayai PT Menara Shipping Agency Batam sebagai *agency* yang membantu proses penerbitan surat ukur kapal baru luncur Barge Patria 3222. Barge Patria 3222 mengajukan permohonan pengukuran kapal kepada PT Menara Shipping Agency Batam yang kemudian akan ditindaklanjuti ke KSOP. Pengajuan permohonan ini mencakup beberapa dokumen yang harus akan diserahkan ke pihak lainnya yang terlibat. Permohonan dan kelengkapan berkas yang diajukan harus sesuai dengan peraturan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam.

b) Pendaftaran

Setelah mengajukan permohonan, kemudian pengguna jasa harus memiliki akun untuk pendaftaran atau untuk mengajukan lagi permohonan di situs *web* yang berlaku di KSOP khusus Batam di www.ksopkhususbatam.id. Jika sudah lengkap, permohonan tersebut akan ditindaklanjuti, namun apabila ada dokumen yang tertinggal, maka permohonan tersebut diserahkan kembali kepada pemohon

c) Pengecekan Dokumen

Setelah itu, kelengkapan dokumen wajib dicek kembali oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal untuk *approved*.

d) Penunjukan *Surveyor*

KSOP akan menugaskan *surveyor* untuk melakukan pengukuran fisik kapal. *Surveyor* yang ditunjuk biasa lebih dari 1 *surveyor*. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan akan efisien dan efektif.

e) Pengukuran Lapangan

Surveyor melakukan pengukuran di lapangan dengan memperhitungkan dimensi kapal dan menghitung tonnase kotor (*gross tonnage*) dan tonnase bersih (*net tonnage*). Pengukuran lapangan ini biasanya melakukan pengukuran terhadap panjang, lebar dan seisi kapal tersebut.

f) Penyusunan Laporan

Setelah pengukuran, *surveyor* menyusun laporan hasil pengukuran yang memuat detail teknis tentang kapal, termasuk tonase dan dimensi yang telah diukur. Laporan ini biasanya berisi panjang, berat, kelengkapan fasilitas kapal dan sebagainya. Dari laporan ini akan menunjukkan kelayakan kapal tersebut untuk beroperasi. Jika kapal tersebut kurang *safety* atau kekurangan fasilitas, maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait. Penyusunan laporan tersebut disalin dalam buku pendaftaran pengukuran dan diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan dan segera dikirim ke kantor pusat dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (bulan). Setelah GT kapal diketahui, ahli ukur akan memberikan PNB (Penerima Negara Bukan Pajak) sebagai upah pemeriksaan kapal dan penerbitan surat ukur sementara yang akan dibayar oleh *owner*.

g) Verifikasi dan Validasi

Laporan pengukuran diverifikasi oleh KSOP untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data. Jika laporan tersebut dapat diterima KSOP, maka penerbitan surat ukur akan segera diproses oleh PT Menara Shipping Agency Batam.

h) Penerbitan Surat Ukur Kapal

Setelah verifikasi selesai dan sudah memperoleh pengesahan dari kantor pusat, KSOP akan menerbitkan surat ukur kapal sementara yang sebelumnya proses pemberkasan tersebut dibantu oleh PT Menara Shipping Agency Batam yang merupakan dokumen resmi yang mencantumkan dan ukuran kapal yang kemudian surat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan kapal. Surat ukur yang diterbitkan akan diperiksa kembali oleh Kasie Status Hukum Kapal untuk disetujui, diparaf dan didistribusikan.

Setelah itu, surat ukur akan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kelaiklautan dan akan diserahkan kepada *owner* kapal. Surat ukur sementara hanya berlaku selama 3 (bulan) dan setelah surat ukur kapal baru luncur akan diterbitkan secara permanen. Selanjutnya untuk penerbitan surat ukur kapal permanen akan dikenakan biaya PNB sesuai dengan GT kapal.

Hubungan Kerja Sama Antar PT Menara Shipping Agency Batam dengan PT Patria Maritim Perkasa Batam

PT Menara Shipping Agency Batam memiliki peran penting bagi *crew/owner* yang memilih bekerja sama dengan perusahaan tersebut, salah satunya dalam pengurusan Surat Ukur Kapal Baru Luncur, khususnya bagi Barge Patria 3222. Barge Patria 3222 merupakan kapal yang dinaungi oleh perusahaan PT Patria Maritim Perkasa Batam yang beroperasi dengan muatan seperti pasir, batu bara, kayu dan bahan bangunan lainnya. Sebelum kapal tersebut beroperasi, Barge Patria 3222 harus memiliki Surat ukur kapal baru luncur yang dapat digunakan sebagai bentuk kelayakan kapalnya. Setelah pihak *owner* mengajukan permohonan dan pihak *agency* menyetujuinya, PT Menara Shipping Agency Batam bertanggung jawab penuh atas proses penerbitan Surat Ukur Kapal Baru Luncur sampai dengan keberangkatan Barge Patria 3222 ke tujuannya. PT Menara shipping Agency Batam harus memastikan seluruh dokumen yang diperoleh dari Barge patria 3222 harus konkrit sebelum diinput ke SIMKAPEL.

Setelah seluruh dokumen Barge Patria 3222 lengkap, pihak *agency* segera menindaklanjuti dokumen tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, tentu PT Menara Shipping Agency Batam juga membutuhkan kerja sama dengan berapa instansi dalam penerbitan surat ukur kapal baru luncur. Setiap instansi tentu memiliki fungsi spesifik yang berbeda untuk memastikan kapal beroperasi secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Instansi yang berkaitan dengan penerbitan surat ukur kapal baru luncur antara lain :

- a) Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut
Peran instansi ini adalah sebagai instansi yang mengatur perkapalan dan semua penerbitan surat di perairan Indonesia.
- b) Kantor Kesyahbandaran
Kesyahbandaran merupakan instansi otoritas yang memiliki tanggung jawab penuh di pelabuhan untuk semua kepentingan yang berkaitan dengan operasional kapal.
- c) Galangan kapal
Galangan kapal memiliki peran dalam membangun kapal baru dan menyediakan dokumen teknis yang dibutuhkan. Dalam hal lain, galangan juga melakukan *cross check* untuk beberapa sertifikat yang disahkan dan memastikan bahwa kapal tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi.
- d) Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) atau Klasifikasi Internasional

Instansi ini biasanya melakukan pengujian serta memastikan bahwa kapal yang akan diproses sudah memenuhi standar kelayakan, keselamatan, lingkungan dan teknis tertentu.

e) Otoritas Pajak

Peran otoritas pajak ini adalah untuk memastikan bahwa pihak yang bersangkutan atau pemilik kapal tidak ada tunggakan pajak kapal.

Kendala Penerbitan Surat Ukur Kapal Baru Luncur Barge Patria 3222

Kendala penerbitan surat ukur pada Barge Patria 3222 terjadi karena dokumen yang diserahkan ke PT Menara Shipping Agency belum memenuhi syarat, sehingga memperlambat proses penerbitan surat ukur. Apabila dokumen-dokumen belum konkrit, maka akan sulit untuk melanjutkan proses surat ukur kapal baru luncur. Dengan demikian, pihak agency siap memberikan solusi dan bantuan lain yang diperlukan untuk mempermudah proses penerbitan. Namun apabila kelengkapan dokumen diawal belum terpenuhi, kemungkinan terjadi penundaan submit dokumen pada SIMKAPEL yang disebabkan oleh *maintenance*.

Selain itu, kendala umum yang sering terjadi antara lain sebagai berikut :

- a) Verifikasi dan Inspeksi Fisik
- b) Prosedur Birokrasi yang Rumit
- c) Ketersediaan Tenaga Ahli
- d) Perubahan Regulasi
- e) Cuaca dan Kondisi Lingkungan
- f) Masalah Teknis Kapal

Solusi Atas kendala Penerbitan Surat Ukur Kapal Baru Luncur Barge Patria 3222

Adapun solusi atas kendala utama penerbitan surat ukur kapal baru luncur pada Barge Patria 3222 dengan cara berkoordinasi dengan pihak *agency* yang dan harus memastikan semua dokumen persyaratan penerbitan surat ukur kapal baru luncur lengkap guna meminimalisir kendala penerbitan surat ukur kapal baru luncur.

Untuk solusi kendala lainnya antara lain sebagai berikut :

- a) Verifikasi dan Inspeksi Fisik

Dalam hal ini, kapal harus benar benar dipastikan dalam kondisi yang baik, mulai dari izin kapal, usia kapal, kualitas awak kapal serta sistem manajemen yang berlaku. Jika kerusakan tersebut sangat beresiko, maka pihak agency memberikan waktu pemilik kapal/ owner untuk memperbaiki kapal tersebut.

- b) Prosedur Birokrasi yang Rumit

Solusi atas kendala ini adalah pemerintah harus menegakan hukum yang progresif. Pelabuhan yang terkait membutuhkan refungsionalisasi dan rekontruksi, terutama di era globalisasi saat ini yang sesuai dengan tujuan NKRI yang berlaku.

c) Ketersediaan Tenaga Ahli

Apabila terdapat kendala terhadap ketersediaan tenaga ahli, contohnya seperti jika tenaga ahli yang sudah ditugaskan mendadak tidak dapat ikut serta dalam pengukuran kapal tersebut, maka solusi dari pihak PT Menara Shipping Agency Batam adalah Pihak *agency* mengajukan permohonan kepada KSOP untuk segera melakukan pergantian ahli tenaga dalam pengukuran kapal guna meminimlaiser keterlambatan penerbitan surat ukur kapal baru luncur.

d) Perubahan Regulasi

Jika perubahan regulasi terjadi, satu-satunya cara ialah perusahaan harus ikut serta menerapkan regulasi tersebut. Karena pada dasarnya, setiap perubahan regulasi memiliki nilai dari segi dampak bisnis.

e) Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Apabila cuaca yang diprediksi akan menimbulkan resiko yang lebih besar, sebaiknya pengukuran kapal ditunda. Mengingat kegiatan pengukuran dilakukan di dalam perairan, maka tenaga ahli lebih mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

f) Masalah Teknis Kapal

Masalah teknis kapal yang terjadi pada proses penerbitan surat ukur kapal baru luncur Barge Patria 3222 adalah terjadinya *maintenance* pada saat penginputan dokumen kapal. *Maintenance system* tidak dapat dipastikan kapan terjadi, maka dari itu untuk sementara PT Menara Shipping Agency Batam beralih ke CMMS (*Computerized Maintenance Management System*). Sistem ini hanya digunakan untuk sementara apabila *maintenance SIMKAPEL* membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat digunakan kembali.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan surat ukur kapal baru luncur oleh KSOP Batam yang berlaku sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Prosedur awal yang harus dilakukan Barge Patria 3222 adalah mengajukan permohonan pengukuran dari Barge Patria 3222 kepada PT Menara Shipping Agency Batam. Kemudian Barge Patria 3222 melakukan pendaftaran *online* pada *website* KSOP khusus Batam

(www.ksopkhususbatam.id). Dokumen yang telah diserahkan akan dicek kembali oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal untuk *approved*. Setelah *approved*, beberapa *surveyor* dikirimkan untuk melakukan pengukuran fisik kapal dan kemudian hasil tersebut disusun menjadi laporan. Jika laporan sudah diterima, maka pihak KSOP akan memverifikasi sekaligus validasi hasil laporan. Untuk penerbitan, *owner* akan diminta menunggu beberapa waktu untuk dapat menerima surat ukur baru luncur tersebut.

Khusus Barge Patria 3222, diperlukannya pemahaman terhadap prosedur penerbitan surat ukur kapal baru luncur sebelum mengajukan permohonan. Barge Patria 3222 harus memastikan bahwa semua dokumen yang menjadi persyaratan harus lengkap dan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tertundanya keberangkatan.

6. DAFTAR REFERENSI

Chandradja, J., & Sabila, F. H. (2024). Prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal melalui sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(3), 261-267.

Engkos, K., & Soewedo, H. (2018). Tentang manajemen perusahaan pelayaran.

Juliyanto, F. (2021). Rekayasa aplikasi manajemen e-filling dokumen surat pada PT Alp (Atosim Lampung Pelayaran). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(1), 43-49.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016).

Kesuma, N., Sabila, F. H., & Chrisnatalanta, C. (2022). Sistem pengurusan sign on buku pelaut crew kapal di Kantor KSOP Khusus Batam pada PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411-416.

Nainggolan, F., Yusnidah, Y., & Sabila, F. H. (2023). Prosedur perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal TB Pancaran 118 pada KSOP oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(4), 316-329.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau KSOP Batam.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengukuran kapal.

Sabila, F. H., & Bancin, S. B. (2024). Proses bongkar muat container di depo oleh PT Prima Indonesia Logistik Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 55-61.

Sabila, F. H., & Rakawitan, F. (2023). Persiapan peralatan dan dokumen sebelum

melaksanakan aktivitas bongkar curah kering pada PT Wahana Intradermaga Niaga Belawan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 509-519.

Setiyantara, Y., Pertiwi, Y., et al. (2022). Analisis pemeriksaan kapal oleh marine inspector pada KSOP Kelas IV Probolinggo. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*.

Sinaga, R., & Sabila, F. H. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.

Sitanggang, P. Y. B., Ridho, S., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2023). Optimization of making dahsukim permits for foreign employees working on lay-up ships at PT. Trans Shipping Agency Batam. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 2(2), 150-159.

Situmorang, E. (2024). Proses penerbitan dokumen persetujuan keagenan kapal asing (PKKA) pada PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 289-296.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.